ANALISIS SEJARAH
https://dx.doi.org/10.25077/jas.v14i2.124

Laboratorium Sejarah
Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya
Universitas Andalas, Padang, Indonesia

Vol. 14, No. 2, 2024 | 41-46

Sejarah Perkembangan Kebijakan Ekonomi Pada Masa Orde Baru dan Pengaruh Krisis Moneter terhadap Perekonomian Indonesia

History of Economic Policy Development during the New Order and the Impact of the Monetary Crisis on Indonesia's Economy

Puspa Unsya Shaleha*, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia
Anita Selviana, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia
Indra Muharman, Universitas Islam Sumatera Utara, Indonesia

ABSTRACT

The history of economic policy development during the New Order era in Indonesia reflects the political and economic dynamics that shaped the nation's development trajectory. Initially, the New Order government adopted a centralized and authoritarian economic development model, emphasizing industrialization and modernization. While these programs spurred economic growth, they also led to social inequality and political tensions. The late 1990s currency crisis, particularly the 1997 Asian financial crisis, significantly destabilized Indonesia's economy. Economic policies of the New Order era, characterized by dependence on foreign debt and imprudent monetary practices, rendered Indonesia susceptible to global financial market fluctuations. The impact of the crisis was profound, manifesting in a sharp decline in economic growth, a currency crisis, and a banking crisis, which compelled the government to implement urgent economic reforms. These reforms included financial sector restructuring, economic deregulation, and enhanced transparency in public financial management. This study provides an in-depth analysis of the New Order's economic policies and the subsequent impact of the currency crisis on Indonesia's economy.

ARTICLE HISTORY

Received 20/05/2024
Revised 24/06/2024
Accepted 04/07/2024
Published 05/07/2024

KEYWORDS

New Order era; economic policy; Indonesia; Asia Financial Crisis; economic reform.

***CORRESPONDENCE AUTHOR**

puspaunsyashaleha@gmail.com

PENDAHULUAN

Orde Baru di bawah kepemimpinan Soeharto menerapkan berbagai kebijakan ekonomi yang bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan stabilitas politik di Indonesia. Kebijakan tersebut mencakup deregulasi pada sektor perbankan dan sektor riil, penarikan investasi asing secara langsung, serta promosi ekspor. Kebijakan ini secara efektif mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang tinggi selama lebih dari dua dekade. Namun, pada tahun 1997, terjadi krisis moneter di Asia yang juga melanda Indonesia. Krisis ini dipicu oleh lemahnya regulasi sektor keuangan domestik dan ketergantungan pada modal asing jangka pendek. Akibatnya, nilai tukar rupiah anjlok tajam, diikuti inflasi dan kontraksi ekonomi yang dalam. Krisis keuangan ini berubah menjadi krisis ekonomi dan politik yang memicu kerusuhan massal dan lengsernya Soeharto dari kekuasaan pada tahun 1998 (Rahmawati, 2022).

Studi ini menganalisis kebijakan ekonomi selama Orde Baru dan dampak krisis moneter terhadap kondisi makroekonomi dan stabilitas politik di Indonesia. Sejarah perkembangan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru di Indonesia adalah suatu perjalanan yang mencerminkan transformasi besar dalam upaya pembangunan nasional. Era Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1966 dan berlangsung hingga 1998, ditandai oleh kekuasaan yang kuat dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Kebijakan ekonomi yang diambil selama periode ini mencerminkan pandangan pemerintah terhadap arah pembangunan ekonomi, industrialisasi, dan modernisasi negara. Pada awal Orde Baru, fokus utama pemerintahan adalah menciptakan pertumbuhan ekonomi yang pesat dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Model ekonomi yang diadopsi bersifat otoriter dan terpusat, dengan pemerintah memiliki peran sentral dalam perencanaan dan pelaksanaan kebijakan ekonomi. Program industrialisasi dan pembangunan infrastruktur ditekankan sebagai langkah-langkah kunci untuk mengangkat tingkat kesejahteraan rakyat.

Namun, kebijakan-kebijakan ini juga menghadirkan tantangan, seperti kesenjangan sosial yang meningkat, korupsi, dan kecenderungan otoritarianisme. Selama periode ini, pemerintah juga cenderung bergantung pada utang

© 2024 The Author(s).
This is an Open Access article distributed under the terms of the Creative Common Attribution License (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

luar negeri untuk mendanai proyek-proyek pembangunan, yang pada akhirnya menciptakan kerentanan terhadap fluktuasi ekonomi global. Puncak dari tantangan ekonomi terjadi pada akhir tahun 1990-an dengan munculnya krisis moneter Asia pada tahun 1997. Indonesia, sebagai salah satu negara yang paling terpukul, mengalami gejolak ekonomi yang luar biasa. Krisis tersebut mengguncang fondasi ekonomi yang telah dibangun selama puluhan tahun dan memaksa pemerintah untuk merespons dengan cepat dan tegas.

Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai, terlebih dahulu pemerintah melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut terutama adalah untuk menekan kembali tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor, yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama. Usaha pemerintah tersebut ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan lima tahun (Repelita) secara bertahap dengan target-target yang jelas sangat dihargai oleh negara-negara Barat (Lestari, 2013).

Sejarah perkembangan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru di Indonesia mencerminkan fase krusial dalam evolusi perekonomian negara ini. Periode Orde Baru, yang dimulai pada tahun 1966 hingga 1998, ditandai oleh pemerintahan yang kuat di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto. Era ini menyaksikan transformasi signifikan dalam arah dan strategi kebijakan ekonomi, yang pada gilirannya memberikan dampak mendalam terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Salah satu momen krusial dalam sejarah ekonomi Indonesia pada masa Orde Baru adalah krisis moneter yang mencapai puncaknya pada akhir tahun 1997. Krisis ini, yang berawal dari krisis keuangan di Asia, memberikan dampak yang sangat serius terhadap perekonomian Indonesia. Oleh karena itu, tulisan ini akan mengeksplorasi sejarah perkembangan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru dan menganalisis pengaruh krisis moneter terhadap perekonomian Indonesia.

Sistem moneter internasional merupakan sistem keuangan yang berlaku untuk semua negara di dunia yang membahas tentang pembayaran atas transaksi lintas negara dilaksanakan. Sistem ini menentukan bagaimana kurs tukar asing ditentukan dan bagaimana pemerintah dapat mempengaruhi kurs tukar. Sistem moneter internasional yang berfungsi dengan baik akan memfasilitasi perdagangan internasional dan investasi, serta mempermudah adaptasi terhadap perubahan. Pembahasan inti dari sistem moneter internasional adalah menentukan pengaturan sistem kurs tukar. Semenjak dimulainya sistem standar emas hingga abad ke-20, sistem moneter internasional telah mengalami pasang surut. Perubahan dari sistem ke sistem yang lain diakibatkan oleh gejolak ekonomi pada saat itu. Sampai saat ini pun sistem moneter internasional masih menjadi perhatian semua negara dan masih ingin merubah sistemnya menjadi lebih berfungsi optimal. Belum lagi rencana anggota negara-negara ASEAN untuk merumuskan kebijakan pemberlakuan mata uang bersama yang hanya berlaku tunggal di kawasan ASEAN (Ronaldo, S, Wahyunissa, & P, 2014).

Krisis moneter tidak hanya memberikan dampak langsung terhadap sektor keuangan, melainkan juga mengakibatkan resesi ekonomi yang dalam dan krisis sosial. Pengangguran meningkat, daya beli masyarakat menurun, dan ketidakstabilan politik semakin meruncing. Proses reformasi ekonomi pun menjadi sebuah keharusan mendesak untuk memulihkan kepercayaan masyarakat dan membangun kembali fondasi ekonomi yang kokoh. Melalui analisis sejarah perkembangan kebijakan ekonomi pada masa Orde Baru dan pengaruh krisis moneter terhadap perekonomian Indonesia, artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang tantangan dan peluang yang dihadapi negara ini dalam mengelola dinamika ekonomi pada periode krusial ini. Dengan demikian, pembaca diharapkan dapat menilai dampak jangka panjang dari kebijakan ekonomi yang diambil pada masa tersebut dan merenungkan implikasinya bagi perkembangan ekonomi Indonesia pada masa yang akan datang.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu metode pengumpulan data melalui observasi, analisis visual, studi pustaka, dan wawancara (baik individual maupun kelompok). Menurut Sugiyono, metode penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti kondisi ilmiah (eksperimen) di mana peneliti berperan sebagai instrumen utama, dengan teknik pengumpulan data yang bersifat kualitatif dan analisis data yang lebih menekankan pada makna (Sugiyono, 2012). Moleong menjelaskan bahwa penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik dan deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moleong, 2018). Penelitian kualitatif menekankan pada kualitas dan kedalaman informasi yang tersedia, menggunakan teknik wawancara yang diungkapkan dalam bentuk kalimat atau

uraian untuk menjelaskan fenomena secara detail dengan mengumpulkan informasi sebanyak mungkin, dan mengutamakan pengamatan terhadap fenomena serta mengkaji lebih dekat kandungan makna dari fenomena tersebut.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman observasi, catatan lapangan, pedoman wawancara, dan lembar kerja siswa (LKS). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan observasi, wawancara, dan studi pustaka. Studi pustaka adalah proses pengumpulan data dari berbagai referensi tertulis seperti buku, artikel, jurnal, dan dokumen lainnya yang relevan dengan topik penelitian, untuk memperoleh landasan teori yang kuat dan memahami konteks historis dan teoritis dari masalah yang diteliti. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengolah data tersebut dengan menggunakan berbagai teknik yang relevan dengan tujuan penelitian. Data yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan studi pustaka diorganisasi dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis kualitatif, yang melibatkan pengolahan data, pengelompokan temuan, dan penarikan kesimpulan berdasarkan data yang telah diolah.

PEMBAHASAN

Sejarah Perekonomian Indonesia pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Sejarah perekonomian Indonesia dibentuk oleh letak geografisnya yang strategis, terletak di persimpangan samudera dan benua di dunia. Munculnya hubungan perdagangan internasional melalui mitra dagang luar negeri berperan penting dalam perkembangan ekonomi negara ini. India, Cina, negara-negara Arab, dan Eropa terlibat dalam perdagangan rempah-rempah yang menjadi komoditas utama (Islamia, Raikhan, Faizy, Majid, & Ridwan, 2023). Sebelum merdeka, perekonomian Indonesia sangat dipengaruhi oleh kolonial Belanda. Sistem ekonomi pada masa penjajahan didasarkan pada monopoli perdagangan yang dipegang oleh perusahaan-perusahaan Belanda, seperti Vereenigde Oostindische Compagnie (VOC) dan Koninklijke Paketvaart-Maatschappij (KPM). Selain itu, sistem pajak menjadi sumber utama penerimaan pemerintah kolonial dengan pungutan pajak yang tinggi terhadap petani dan buruh (Leirissa, Ohorella, & Tangkilisan, 1996).

Perekonomian Indonesia selama pemerintahan Orde Baru, yang mencakup periode dari tahun 1966 hingga 1998, dimulai setelah Presiden Soekarno digantikan oleh Jenderal Soeharto dalam peristiwa "Gerakan 30 September" atau G30S/PKI pada tahun 1965. Pada awal masa pemerintahan Orde Baru, Indonesia mengalami kondisi ekonomi yang sulit akibat inflasi tinggi, ketidakstabilan politik, dan ketegangan antara etnis dan agama. Dengan keluarnya SUPERSEMAR pada 11 Maret 1966, yang menandai awal Orde Baru, Soeharto mulai menerapkan kebijakan yang berbeda dari pendahulunya. Menurut Setia, pergantian pemerintahan ini memiliki dinamika politik yang berbeda, dengan Soeharto lebih menekankan pada ketahanan nasional sebagai respons terhadap krisis ekonomi dan berbagai pemberontakan yang melanda Indonesia selama masa Orde Lama (Setia, 2023).

Pembangunan ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan Soeharto dilakukan dengan fokus pada stabilitas politik domestik, pertahanan, dan keamanan. Mengembangkan hubungan dengan negara-negara Barat memungkinkan Indonesia untuk menerapkan politik bebas aktif. Negara-negara Barat, termasuk pengusaha, investor asing, dan perbankan, memainkan peran penting dalam membangun ketahanan nasional Indonesia. Dalam hubungan politik internasional ini, Indonesia menjalin kerjasama yang baik dengan negara-negara Barat, terutama Amerika Serikat, yang turut membantu dalam pembangunan ketahanan nasional. Hubungan ini semakin baik saat Presiden Soeharto meluncurkan kebijakan baru, yaitu Undang-Undang Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967, yang memungkinkan pengusaha dalam negeri dan asing untuk mendirikan perusahaan di Indonesia. Undang-Undang PMA ini dibuat untuk menggerakkan perekonomian yang berorientasi pada pasar, mengingat perekonomian Indonesia sebelumnya bergantung pada pendapatan ekspor perminyakan.

Dalam implementasinya di bidang pembangunan ekonomi, pemerintahan Soeharto menerapkan kebijakan ekonomi dengan konsep Trilogi Pembangunan yang terdiri dari: (1) Pemerataan pembangunan; (2) Pertumbuhan ekonomi; dan (3) Stabilitas nasional. Dalam pelaksanaannya, stabilitas nasional digunakan untuk mengontrol pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan menarik investor asing. Akibat dari pertumbuhan ekonomi ini, kesejahteraan mulai tersebar luas sebagai hasil dari pemerintahan yang berkeadilan. Pemerintahan Orde Baru juga berusaha memperbaiki sistem ekonomi dengan menerapkan program stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Sebelum rencana pembangunan lewat Repelita dimulai, pemerintah terlebih dahulu melakukan pemulihan stabilitas ekonomi, sosial, dan politik serta rehabilitasi ekonomi di dalam negeri. Sasaran dari kebijakan tersebut adalah untuk menekan kembali

tingkat inflasi, mengurangi defisit keuangan pemerintah, dan menghidupkan kembali kegiatan produksi, termasuk ekspor, yang sempat mengalami stagnasi pada masa Orde Lama. Usaha pemerintah ini ditambah lagi dengan penyusunan rencana pembangunan lima tahun (Repelita) secara bertahap dengan target-target yang jelas, yang sangat dihargai oleh negara-negara Barat (Ronaldo et al., 2014).

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia pada era Orde Baru dipengaruhi oleh banyak faktor dari berbagai sektor, termasuk sistem keuangan dan kebijakan moneter yang diberlakukan di Indonesia. Terpeliharanya stabilitas sistem keuangan dan kebijakan moneter yang tepat merupakan dimensi stabilitas nasional yang menjadi bagian integral dan sasaran pembangunan nasional. Stabilitas Sistem Keuangan (SKK) adalah kondisi yang memungkinkan sistem keuangan nasional berfungsi secara efektif dan efisien serta mampu bertahan terhadap kerentanan internal dan eksternal, sehingga alokasi sumber pendanaan dapat berkontribusi pada pertumbuhan dan stabilitas perekonomian nasional (Nugroho et al., 2020).

Strategi informasi juga sangat penting untuk keberhasilan program migrasi. Pada masa pemerintahan Orde Baru, misalnya, kemiskinan penduduk menjadi salah satu indikator penilaian pembangunan nasional. Pada tahun 1976, jumlah penduduk miskin di Indonesia sekitar 54,2 juta orang atau 40,08 persen dari total penduduk. Data tahun 1996 menunjukkan penurunan jumlah penduduk miskin menjadi 22,5 juta orang atau hanya 11,34 persen dari total penduduk. Ekonomi Indonesia tumbuh rata-rata 5 persen per tahun, dengan Repelita II tumbuh sebesar 7,5 persen, Repelita III tumbuh sebesar 6,5 persen, Repelita IV tumbuh sebesar 5 persen, dan Repelita V tumbuh sebesar 5 persen. Perkembangan tersebut, khususnya kebijakan informasi migrasi, berdampak penting karena keberhasilan program pembangunan nasional (Islamia et al., 2023). Namun, berbagai kebijakan pemerintah Orde Baru sering kali memberikan keharusan-keharusan baru terkait pelaksanaan demokrasi Pancasila. Namun, demokrasi yang diterapkan bukanlah demokrasi sesungguhnya, melainkan demokrasi teknis. Kehidupan politik pada masa Orde Baru sangat menyedihkan karena adanya tekanan dan permainan kekuasaan pemerintah terhadap pihak oposisi atau pemikir kritis.

Krisis Moneter yang Terjadi di Indonesia

Krisis moneter yang menimpa Indonesia adalah dampak terbesar yang dirasakan masyarakat akibat berbagai kebijakan ekonomi pemerintah. Berbagai permasalahan muncul dalam rentang waktu dua tahun saat inflasi mencapai titik tertingginya, yang menimbulkan berbagai problem baru seperti komplikasi penyakit sosial. Masalah yang ada, apabila terlambat atau kurang tepat penanganannya, menyebabkan munculnya masalah lain sebelum masalah sebelumnya terselesaikan. Hal ini menyebabkan penumpukan permasalahan dan tugas bagi pemerintah sendiri (Afiyah, 2021). Untuk pertama kalinya dalam sejarah Orde Baru, masyarakat mengalami kekalutan yang luar biasa dengan memborong barang apa saja yang bisa dibeli untuk persediaan kebutuhan hidupnya. Dalam perspektif sejarah Indonesia, masa-masa kekalutan sosial dan politik akibat krisis moneter ini hanya dapat dibandingkan dengan periode 1944-1946, masa akhir pendudukan Jepang dan masa awal revolusi Indonesia, dan periode 1964-1966, masa peralihan kekuasaan dari rezim Orde Lama ke Orde Baru. Ciri-ciri yang menonjol dari fenomena sejarah seperti itu adalah masyarakat dilanda oleh ketidakpastian, rumor dan desas-desus menyebar, tingkat inflasi tinggi, dan masyarakat antre beras, antre minyak, serta antre kebutuhan pokok lainnya (Suwirta, 2007).

Perekonomian Indonesia mengalami pasang surut dalam masa pemulihan krisis ekonomi yang melanda negara ini. Pasca-krisis 1998, Indonesia terus mengupayakan pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan, pertumbuhan ekonomi yang tinggi, dan membangun landasan ekonomi yang kokoh. Harapannya adalah memperbaiki standar kehidupan masyarakat, mengurangi kemiskinan, dan memperluas lapangan pekerjaan (Fachrunnisa, Armiyati, & Jayusman, 2023). Krisis moneter di Indonesia terjadi selama dua tahun, yakni pada tahun 1997 dan 1998. Menurut IMF, krisis moneter pada tahun tersebut terjadi karena pemerintah terlambat dalam meminta bantuan kepada IMF, yang baru dilakukan setelah nilai rupiah sangat terdepresiasi. Hal ini menyebabkan krisis moneter yang berkepanjangan.

Inflasi pada tahun 1998 mengalami lonjakan dari 11,10% menjadi 77,60% atau sekitar tujuh kali lipat. Hal ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi yang memiliki hubungan berbanding terbalik dengan inflasi. Kenaikan inflasi yang drastis diimbangi dengan turunnya pertumbuhan ekonomi. Ketidakstabilan ini memperburuk kondisi ekonomi Indonesia secara keseluruhan, membuat pemerintah harus mengambil langkah-langkah yang drastis untuk mengendalikan situasi tersebut (Haryati, 2014). Krisis moneter ini mengakibatkan berbagai dampak negatif pada sektor ekonomi dan sosial di Indonesia. Penurunan tajam nilai tukar rupiah menyebabkan harga-harga barang impor

melambung tinggi, yang pada gilirannya memperburuk inflasi. Bank-bank mengalami kesulitan likuiditas, banyak perusahaan gulung tikar, dan angka pengangguran meningkat tajam. Masyarakat mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang mengakibatkan meningkatnya angka kemiskinan. Krisis ini juga memicu ketidakstabilan politik yang signifikan, yang berujung pada lengsernya Presiden Soeharto setelah lebih dari tiga dekade berkuasa.

Dalam upaya pemulihan, pemerintah Indonesia melakukan berbagai langkah reformasi ekonomi yang didukung oleh IMF dan institusi internasional lainnya. Reformasi ini termasuk restrukturisasi sektor perbankan, peningkatan transparansi dalam pengelolaan keuangan publik, serta deregulasi ekonomi untuk menciptakan lingkungan yang lebih kondusif bagi investasi. Meskipun langkah-langkah ini memerlukan waktu untuk menunjukkan hasil yang signifikan, mereka adalah langkah penting dalam menstabilkan ekonomi Indonesia dan mencegah krisis serupa di masa depan.

SIMPULAN

Sejarah perekonomian Indonesia dipengaruhi oleh letak geografisnya yang strategis, terbentang dari awal abad ke-20 hingga saat ini. Perkembangan perekonomian negara ini dipengaruhi oleh perdagangan internasional, khususnya dengan India, Tiongkok, Arab, dan negara-negara Eropa. Pada masa Orde Baru (1966-1998), sistem perekonomian negara diwarnai oleh buruknya kondisi ekonomi, ketidakstabilan politik, dan ketegangan antar suku dan agama. Pemerintahan Presiden Jenderal Soeharto menerapkan kebijakan "Supersemar" yang fokus pada pembangunan nasional. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi berbagai permasalahan, seperti kemiskinan, kesenjangan, dan konflik, serta menjamin stabilitas dan kesejahteraan penduduk Indonesia.

Pemerintah menerapkan kebijakan "Modal Asing" pada tahun 1967, yang bertujuan untuk mengendalikan pertumbuhan ekonomi dan menarik investasi asing. Kebijakan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan stabilitas ekonomi, stabilitas sosial dan politik, serta rehabilitasi ekonomi dalam negeri. Selama masa ini, strategi pembangunan ekonomi didasarkan pada Trilogi Pembangunan yang meliputi pemerataan pembangunan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional. Kebijakan ini berhasil menarik investor asing dan mendukung pembangunan infrastruktur serta industrialisasi, meskipun juga menimbulkan beberapa tantangan seperti ketimpangan sosial dan korupsi.

Secara keseluruhan, sejarah perekonomian Indonesia dibentuk oleh letak geografis yang strategis, upaya untuk mencapai stabilitas politik, dan kebijakan ekonomi yang diterapkan selama masa Orde Baru. Pemerintah Orde Baru berusaha memperbaiki kondisi ekonomi melalui berbagai program pembangunan, yang meskipun menghadapi berbagai tantangan, berhasil memberikan landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan ekonomi selama periode ini telah memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan perekonomian Indonesia dan membentuk dasar bagi kebijakan-kebijakan ekonomi di masa mendatang.

REFERENSI

Afiyah, M. S. (2021). Reformasi Ekonomi Habibie 1998-1999: Sebuah Kebijakan Atasi Krisis Ekonomi Orde Baru. *Sejarah Dan Budaya : Jurnal Sejarah, Budaya, Dan Pengajarannya*, *15*(2), 249. https://doi.org/10.17977/um020v15i22021p249-262

Fachrunnisa, L. K., Armiyati, L., & Jayusman, I. (2023). Strategi Pemerintah Indonesia Mengatasi Masalah Ekonomi pada Masa Reformasi (1999 – 2004). *Estoria: Journal of Social Science and Humanities*, *4*(1), 494–513. https://doi.org/10.30998/je.v4i1.2126

Haryati, D. S. (2014). Analisis Inflasi Pra dan Pasca Krisis Moneter dalam Perekonomian Indonesia. *Economics Development Analysis Journal*, *3*(2), 393–401. https://doi.org/https://doi.org/10.15294/edaj.v3i2.3848

Islamia, R., Raikhan, I., Faizy, A., Majid, F. A., & Ridwan, M. (2023). Analisis Perkembangan Perekonomian Indonesia Secara Histori. *Jurnal Ekonomi Manajemen*, *18*(01), 10–15.

Leirissa, R. Z., Ohorella, G. A., & Tangkilisan, Y. B. (1996). *Sejarah Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Rl Jakarta.

Lestari, D. A. (2013). Perekonomian Indonesia Makalah Perekonomian Indonesia. *Www.Academia.Edu*, (March), 1–17.

Moleong, L. J. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

Nugroho, H., Solikha, I., Mutiara, M., Haykal, M., Shabrina, N. N., Tambak, R. A., … Yuniar, V. (2020). Pengaruh Sistem Keuangan dan Kebijakan Moneter Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Era Orde Baru dalam Perspektif

Ekonomi Islam. *Naskah Publikasi - Perbankan Syariah/Fakultas Ekonomi Dan Bisnis UIN Jakarta*, 1–17.

Rahmawati, R. (2022). Repelita: Sejarah Pembangunan Nasional di Era Orde Baru. *ETNOHISTORI: Jurnal Ilmiah Kebudayaan Dan Kesejarahan*, *10*(2).

Ronaldo, E., S, T. A., Wahyunissa, D., & P, B. O. (2014). Analisis Perkembangan Sistem Moneter Internasional dan Krisis Moneter di Indonesia. *Academia.Edu*, (1), 1–72.

Setia, N. (2023). Keterlibatan Amerika Serikat dalam Upaya Pembangunan Ekonomi Indonesia Era Soeharto 1966-1980. *Journal of Indonesian History*, *11*(1), 44–54.

Sugiyono. (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: Alfabeta.

Suwirta, A. (2007). Krisis Moneter, Gejolak Politik, dan Perlunya Reformasi Pendidikan di Indonesia. *Abdul Razaq Ahmad & Andi Suwirta. Sejarah Dan Pendidikan Sejarah: Perspektif Malaysia Dan Indonesia. Bandung Dan Bangi: Historia Utama Press Dan Penerbit UKM [Universiti Kebangsaan Malaysia]*, *4*(4), 171–188.

© Puspa Unsya Shaleha, Anita Selviana, & Indra Muharman, 2024